



dpmptsp
LUWU TIMUR
melayani anda, membangun bersama

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Renja ini disusun untuk memenuhi kewajiban Instansi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan. Perubahan permendagri atau pengganti Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Renja ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Renja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak yang sifatnya konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renja dimasa mendatang.

Ucapan terima kasih kepada tim yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun Anggaran 2022 ini.

Malili, Juni 2021

Kepala Dinas


Andi Habil Unru, SE
Pangkat : Pembina
Nip : 19641231 198703 1 208

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv

BAB. I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II : HASIL EVALUASI RENJA DPM-PTSP TAHUN 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPM-PTSP
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPM-PTSP
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

BAB. III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPM-PTSP
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB. IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V : PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), salah satu bahan yang digunakan sebagai tolok ukur adalah Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan tahunan yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 erat kaitannya dengan dokumen-dokumen lain yang menjadi Prioritas Pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja ini juga berkaitan dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah yang menjadi perhatian antara lain :

1. Program dalam Renja Perangkat Daerah harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome) indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Mengingat arti Strategis dokumen Rencana Kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia)Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
-

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor); ***(Menunggu dari Kemendagri)***;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
-

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 MAKSUD

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 ini adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur kedalam program/kegiatan tahunan.
-

2. Menjadi acuan bagi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan menentukan prioritas-prioritas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2022 dapat tercapai.
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (Stakeholders) tentang rencana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Mempermudah Pengendalian, monitoring evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022.
6. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur.

1.3.2 TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja tahun 2022 adalah :

1. Agar konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.
 2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Luwu Timur.
 3. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan penanggulangan bencana.
 4. Meningkatkan pembinaan dan pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
-

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah untuk merumuskan kebijakan dan program kerja guna meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya serta berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Renja sebagai alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan strategi, visi dan misi organisasi perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP-PTSP) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berisi tentang:
 - a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
-

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor–faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam RPJMD/Renstra /Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional;
 - d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
 - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
-

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan–temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan diperoleh;
 - b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
-

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan uraian mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan;
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan;
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

4.1. Catatan Ketersediaan Anggaran

4.2. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

4.3. Rencana Tindak Lanjut

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) tahun 2020 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan atau realisasi APBD DPM-PTSP. Pada Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) melaksanakan 9 program dan 31 kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.364.089.732,- atau sebesar 90,14% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.731.883.450,- yang terdiri atas belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.868.608.264,- atau sebesar 90,06 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.074.960.175,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.495.481.468,- atau sebesar 90,26 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.656.923.275,-. Untuk lebih jelasnya kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut :

LAMPIRAN 1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD Tahun 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (Tahun n-2)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu 2020 (n-2)			Target Program/ Kegiatan Tahun 2021 (Renja SKPD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d n tahun berjalan 2021		SKPD Pelaksana
					Target Renja SKPD Tahun 2020 (Tahun n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020 (Tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021 (Tahun berjalan/ n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran (%)		100	95	98	1.03				DPMP TSP
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda (1200 Surat) (Surat)		1005	900	1332	1.48				

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening bulanan jasa komunikasi sda, listrik dan TV kabel yang terbayarkan (48 Rekening) (Rekening)	60	56	55	0.98				
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayarkan (2 orang) (orang)	2	2	2	1.00				
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (41 jenis) (jenis)	38	6	5	0.83				
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan (50 Jenis) (Jenis)	49	30	30	1.00				
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia (12 jenis) (jenis)	12	12	12	1.00				
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan minuman yang diadakan (608 orang) (orang)	900	608	488	0.80				
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan (60 eksamplar) (eksamplar)	60	48	48	1.00				
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak/gas/Pelumas yang disediakan (2 Jenis) (Jenis)	2	2	2	1.00				
penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (2 Jenis) (Jenis)	2	3	3	1.00				

	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas untuk Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah yang diikuti (40 kali) (kali)	43	31	46	1.48				
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis	jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/teknis yang terbayarkan (20 orang) (orang)	16	20	20	1.00				
	Monitoring dan Evaluasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi per triwulan yang disusun (4 dokumen) (dokumen)	4	4	4	1.00				
	Kunjungan kerja dalam daerah	jumlah kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan (167 kali) (kali)	167	110	110	1.00				
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur ()	80	100	97	0.97				
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Jenis)	4	5	5	1.00				
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara (Gedung Kantor)	1	1	1	1.00				
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	4	4	3	0.75				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Aparatur ()	100	100	100	1.00				

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop dan seminar (Orang)		17	4	4	1.00				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Penyusunan sistim Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu ()		100	100	100	1.00				
	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan	jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (3 dokumen) (dokumen)		1	1	1	1.00				
	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Tersusun Tepat Waktu ()		100	100	100	1.00				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun (Dokumen)		6	6	6	1.00				
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor PMA dan PMDN (Investor)		13	13	13	1.00				
	penyelenggaraan promosi investasi daerah	jumlah penyelenggaraan promosi yang dilakukan dan diikuti		5	1	0	-				
	Penyediaan dan Penyebarluasan informasi Investasi	Jumlah media publikasi (Media publikasi)		4	1	1	1.00				
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah minat dan rencana investasi (Investor)		12	45	45	1.00				

	Fasilitasi Temu Usaha Kerjasama Investasi	Jumlah temu usaha kerjasama investasi yang diselenggarakan (Even)	2	5	5	1.00				
	penyusunan dan pemuktahiran data base penanaman modal	Jumlah database yang disusun (laporan)	1	1	1	1.00				
	koordinasi dan konsultasi penanaman modal	Jumlah temu usaha kemitraan antara UMKM dengan perusahaan Nasional (dokumen0	2	1	1	1.00				
	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Persentase izin yang diterbitkan (persentase (%))	14	90	100	1.11				
	fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha	jumlah izin yang diterbitkan (izin)	2922	2250	4376	1.94				
	penyediaan publikasi informasi perizinan	jumlah jenis perizinan yang dipublikasikan (media)	4	4	4	1.00				
	pengembangan sistem, data dan informasi perizinan	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)	17	17	17	1.00				
	Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan PTSP	Persentase Realisasi Investasi (Persen)	90	90	98.81	1.10				
	Pengawasan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	jumlah laporan Pengawasan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang disusun (Dokumen)	4	4	4	1.00				
	Pembinaan Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah PMA dan PMDN dibina/dipantau (investor)	10	20	21	1.05				

	Fasilitasi Pengaduan Penanaman Modal dan PTSP	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (persen)		90	90	67	0.74				
--	---	---	--	----	----	----	------	--	--	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Secara umum Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun 2020 dapat diamati dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dari urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2020, meliputi :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

- Penyediaan dan penyebarluasan Informasi, merupakan kegiatan yang bersifat promosi dan penyampaian informasi tentang investasi dan kondisi perkembangan investasi di Kabupaten Luwu Timur. Penyebaran informasi ini menggunakan media koran dalam hal ini koran Lokal/nasional. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah media, target kinerja 1 media dan terealisasi sebanyak 1 media dengan capaian sebesar 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar 100%.
- Penyelenggaraan promosi Investasi daerah, merupakan kegiatan pelaksanaan pameran daerah yang dilaksanakan di Kabupaten, Luar Kabupaten dan Luar Provinsi dengan tujuan sebagai ajang promosi daerah melalui penyebaran informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki dan membuka peluang usaha kerjasama serta kemitraan dengan peserta dan

pelaku bisnis serta sebagai tolak ukur kekuatan daya saing produk-produk keunggulan daerah yang dipamerkan. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indicator jumlah pameran yang diikuti, target kinerja 1 pameran dan tidak terealisasi. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.115.720.000,- terealisasi sebesar Rp 19.160.000,- atau sebesar 16,95%. Kegiatan pameran tidak terlaksana disebabkan karena adanya pandemic covid19 yang masih terus berlanjut hingga akhir Tahun 2020 sehingga semua kegiatan yang melibatkan banyak orang dan mengumpulkan kerumunan orang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan secara langsung.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- Penyusunan Data Base Penanaman Modal, Dalam rangka mendukung kegiatan promosi penanaman modal perlu dilakukan penyusunan database penanaman modal yang terbaru setiap tahun agar menjadi acuan bagi pelaku usaha atau calon investor. Pembuatan database sangat diperlukan bahkan ditingkatkan ketinggian data yang lebih spesifik seperti dibuatkan kajian bisnis untuk menilai apakah sector tersebut layak untuk investasi. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah Laporan, target kinerja 1 laporan database penanaman modal dan terealisasi sebanyak 1 laporan dengan capaian sebesar 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 48.575.000,- terealisasi sebesar Rp. 45.390.000,- atau sebesar 93,44%.
- Fasilitasi Temu usaha Kerjasama Investasi, merupakan kegiatan pelaksanaan pameran daerah yang dilaksanakan di Kabupaten, Luar Kabupaten dan Luar Provinsi dengan tujuan sebagai ajang promosi daerah melalui penyebaran informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki dan membuka peluang usaha kerjasama serta kemitraan dengan peserta dan pelaku bisnis serta sebagai tolak ukur kekuatan daya saing produk-produk keunggulan daerah yang dipamerkan. Untuk capaian pada kegiatan ini

dengan indikator jumlah pameran yang diikuti, target kinerja 1 pameran dan tidak terealisasi. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.115.720.000,- terealisasi sebesar Rp 19.160.000,- atau sebesar 16,95%. Kegiatan pameran tidak terlaksana disebabkan karena adanya pandemic covid19 yang masih terus berlanjut hingga akhir Tahun 2020 sehingga semua kegiatan yang melibatkan banyak orang dan mengumpulkan kerumunan orang tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan secara langsung.

- Koordinasi dan konsultasi Penanaman Modal, merupakan kegiatan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan dalam rangka evaluasi pelaksanaan dan kendala dalam rangka pencapaian target rencana investasi penanaman modal. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif dalam rangka memetakan kendala-kendala yang dihadapi oleh investor dalam rangka mencapai target investasi yang telah direncanakan. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah kegiatan yang dilakukan, target kinerja 1 kegiatan dengan realisasi 100%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.119.865.000,- terealisasi sebesar Rp 117.065.500,- atau sebesar 97,66%.

3. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha, merupakan kegiatan penyediaan dan penerbitan izin. Penerbitan izin ini menggunakan aplikasi OSS dan SICANTIK. Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan 33 jenis izin. Untuk capaian pada kegiatan ini dengan indikator jumlah izin yang diterbitkan, target kinerja 2.250 izin dan terealisasi sebanyak 4.376 dengan capaian sebesar 194,48%. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp.150.052.000,- terealisasi sebesar Rp. 144.599.000,- atau sebesar 96,36%.

Adapun jenis-jenis izin antara lain :

- Izin Lingkungan Hidup
- Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- Izin Lokasi
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman dan perumahan
- Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
- Sertifikat layak fungsi bangunan
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
- Tanda daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- Izin Usaha Industri (IUI)
- Tanda daftar Industri (TDI)
- Tanda Daftar Gudang (TDG)
- Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
- Izin Rumah Potong Hewan
- Izin Usaha Peternakan
- Surat Izin Usaha lembaga Penempatan tenaga kerja Swasta (LPTKS)
- Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
- Perpanjangan IMTA
- Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT)
- Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan
- Izin Tenaga Kesehatan
- Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga
- Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal oleh Masyarakat
- Izin Trayek
- Izin Usaha Transportasi

- Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam
- Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha toko Swalayan
- Surat Tanda pendaftaran waralaba (STPW)
- Izin Usaha Perikanan (IUP) Pembudidayaan Ikan
- Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten
- Izin Reklame
- Izin Penelitian

Tetapi tidak semua izin diterbitkan, hanya sesuai dengan permintaan dan pemenuhan syarat administrasi dan kebijakan yang ada. Penerbitan izin melibatkan 12 Instansi teknis terkait yang sesuai dengan penerbitan Izin antara lain : Dinas transmigrasi Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

➤ Penyediaan Publikasi informasi Perizinan

Target Output kegiatan adalah jenis media perizinan yang digunakan. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 100% dari Target Anggaran Sebesar Rp.22.000.000,- yang terdiri dari Belanja Cetak. Target kinerja pada kegiatan ini sebanyak 4 jenis dan terealisasi sebesar 100%, terdiri dari Payung, tas perizinan, buku perizinan dan brosur. Cara pendistribusian media Payung dan tas perizinan ini diberikan kepada pengurus izin yang melakukan pembayaran IMB, buku dan brosur perizinan diberikan ke masing-masing Kecamatan, pengurus izin yang langsung ke kantor dan ke instansi teknis terkait dengan perizinan.

- Pengembangan Sistem data dan Informasi perizinan
Target Output kegiatan adalah tersedianya data dan informasi perizinan. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 77,44% dari Target Anggaran Sebesar Rp.16.748.000,- yang terdiri dari Belanja ATK, belanja penggandaan, jilid dan perjalanan dinas. Target kinerja pada kegiatan ini sebanyak 17 dokumen dan terealisasi sebesar 100%. Dokumen ini meliputi laporan jenis-jenis perizinan, jumlah izin, dan prosedur perizinan yang dilakukan perbulan, pertriwulan dan tahunan. Dokumen ini diserahkan dan dilaporkan kesemua instansi terkait/instansi teknis, provinsi dan pusat.

4. Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal PTSP

didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- Pengawasan Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan
Pengawasan penanaman modal merupakan pengawasan terhadap pengumpulan, verifikasi dan evaluasi LKPM yang meliputi: keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan yang dimiliki, realisasi investasi dan permodalan. Kegiatan pengawasan penanaman modal ini dilakukan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Luwu Timur. Dalam pelaksanaannya Investor/perusahaan yang telah memiliki Ijin Prinsip (IP) diharapkan segera melaporkan LKPM secara online baik itu masa kontruksi/pembangunan yang dilaporkan setiap 3bulan sekali maupun 6 bulan sekali. Target Output kegiatan adalah Jumlah laporan pengawasan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan yang disusun. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 99,08% dari Target Anggaran Sebesar Rp.57.794.775,- yang terdiri dari Belanja ATK, belanja penggandaan, jilid dan perjalanan dinas. Target kinerja pada kegiatan ini sebanyak 4 laporan dan terealisasi sebesar 100%. Dokumen ini meliputi laporan per triwulan.

➤ **Pembinaan Penanaman Modal dan PTSP**

Kegiatan Pembinaan penanaman modal adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal/investor/perusahaan untuk merealisasikan penanaman modalnya. Dengan pelaporan LKPM secara berkala, pemerintah dapat memantau dan mengawasi perkembangan Penanaman Modal sehingga apabila ada kendala dapat dilakukan pembinaan. Anggaran untuk kegiatan Pembinaan sebesar Rp48.654.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp44.892.000,- atau sebesar 92,27%. Target kinerja pada kegiatan ini berupa pembinaan kepada 20 perusahaan dan terealisasi sebanyak 21 perusahaan yang dibina dalam pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

➤ **Fasilitaasi pengaduan penanaman modal dan PTSP**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Dalam pelaksanaannya pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan difasilitasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada, apabila pengaduan itu bukan ranah tingkat Kabupaten maka akan difasilitasi dan dilanjutkan ke Provinsi. Anggaran untuk kegiatan Pembinaan sebesar Rp20.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.193.000,- atau sebesar 90,97%. Target kinerja pada kegiatan ini berupa persentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan Kegiatan ini bersifat persediaan.

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan aparatur pada DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur guna peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2020 Program ini dilaksanakan dengan 13 kegiatan yaitu :

➤ **Penyediaan Jasa Surat menyurat**

Target *output* kegiatan adalah jumlah surat masuk dan surat keluar yang diagenda sebanyak 900 surat terealisasi sebanyak 1.332 surat capaian 148%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 95,29% dari Target Anggaran Sebesar Rp.. 2.760.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 2.630.000,-.

➤ **Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**

Penyelenggaraan pembayaran biaya listrik dan air kantor dilaksanakan selama 12 bulan dengan jumlah rekening sebanyak 55, dari target Output kegiatan adalah sebanyak 56 Rekening sehingga realisasi capaian 98,21%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 88,18% dari target Anggaran Sebesar Rp.. 89.400.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 78.832.088,-. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran sesuai dengan pemakaian.

➤ **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman. Target Output kegiatan adalah Jumlah tenaga upah jasa kebersihan kantor terbayarkan tiap bulan sebanyak 2 orang dan terealisasi 2 orang capaian 100%. Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar 96,98%. Anggaran Sebesar Rp. 27.285.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 26.461.000,- Kegiatan ini terdiri dari belanja alat-alat pembersih dan pembayaran honor/upah jasa Cleaning service.

➤ **Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan perbaikan peralatan kerja agar dapat berfungsi dengan baik. Target Output kegiatan adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki sebanyak 6 jenis dan terealisasi 5 jenis atau 83,33%. Ketersediaan jaringan listrik dengan input tegangan yang tidak stabil menyebabkan rentannya kerusakan peralatan kerja terutama peralatan elektronik. Anggaran sebesar Rp. 20.500.000,- terealisasi Sebesar Rp 15.535.000,- atau 75,78%.

➤ **Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Target *output* kegiatan adalah jumlah ATK yang disediakan sebanyak 30 jenis, terealisasi 30 jenis capaian sebesar 100%. Anggaran sebesar Rp.

20.003.500,- terealisasi Sebesar Rp. 19.075.000,- atau 95,36%.
Penggunaan ATK disesuaikan dengan kebutuhan kantor

➤ **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan yaitu sebanyak 3 jenis dan terealisasi 3 jenis. Anggaran Sebesar Rp. 11.000.000,- dan terealisasi Sebesar Rp. 9.388.000,- atau 85,35%.

➤ **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor. Target *output* kegiatan adalah Persentase komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan sebanyak 100% dan terealisasi 100%. Anggaran sebesar Rp. 3.000.000,-, terealisasi Sebesar Rp. 2.505.000,- Adapun komponen alat listrik tersebut terdiri dari kabel, piiting, steker dan balon lampu. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

➤ **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan minat baca serta meningkatkan pengetahuan bagi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Target *output* kegiatan adalah Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan sebanyak 48 eksampler (surat kabar lokal, surat kabar regional dan surat kabar nasional) dan terealisasi 48 eksemplar atau 100 %. Anggaran Sebesar Rp.5.280.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 5.130.000,- atau 97,16%.

➤ **Penyediaan Makan dan Minum**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah Makan dan Minum yang disediakan sebanyak 584 kotak dan terealisasi 541 kotak atau 93,15%. Anggaran Sebesar Rp.9.360.000,- dan realisasi Sebesar Rp. 8.030.000,- atau 85,79%.

➤ **Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan DPKPP serta sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat, propinsi dan kabupaten sebagai upaya peningkatan Pengembangan program dan kegiatan yang ada pada DPKPP. Dari target *output* kegiatan adalah Jumlah perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 31 kali terealisasi 46 kali capaian 148,38%. Anggaran Sebesar Rp. 179.370.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 178.103.800,- atau 99,29%.

➤ **Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah upah jasa yang dibayarkan sebanyak 20 terealisasi 20 orang, sehingga capaian 100%. Anggaran Sebesar Rp.264.000.000,- dan terealisasi Sebesar Rp. 261.000.000,- atau 98,86%.

➤ **Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monev tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan sesuai dengan anggaran kas. Target *output* kegiatan adalah Jumlah laporan monitoring dan evaluasi triwulan yang disusun sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 100%. Anggaran sebesar Rp. 8.227.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.127.000,-

Laporan monitoring dan evaluasi yang dibuat terdiri :

- Evaluasi Renja Triwulanan
- Evaluasi RKPD
- Realisasi Anggaran Triwulanan
- Realisasi Fisik (Konstruksi) APBD Triwulanan

➤ **Kunjungan Kerja Dalam Daerah**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah kunjungan kerja dalam daerah yang dilaksanakan sebanyak 110 kali dan terealisasi 110 kali capaian 100%. Anggaran sebesar Rp 73.436.000,- realisasi Sebesar Rp. 73.306.200,-.

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan agar tercipta lingkungan kerja yang memadai serta ketersediaan peralatan untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi.

➤ **Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Target *output* kegiatan Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sebanyak 5 jenis dan teralisasi 100%. Anggaran Sebesar Rp. 190.660.000,- , Realisasi Sebesar Rp. 183.872.000,- . Pengadaan terdiri dari:

- Pengadaan Sepeda motor 6 unit
- Pengadaan printer 1 unit
- Pengadaan scanner 1 unit
- Pengadaan lemari arsip 2 unit
- Pengadaan Smartphone 2 unit

➤ **Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah gedung kantor yang disediakan 2 unit dan teralisasi 2 unit atau sebesar 100%. Anggaran Sebesar Rp. 30.000.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 30.000.000,-. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi bangunan gedung kantor.

➤ **Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 4 unit dan terealisasi 3 unit atau sebesar 81,25 %. Anggaran sebesar 45.804.000,- terealisasi sebesar 39.974.810,-. Atau sebesar 87,27%, hal ini disebabkan karena 1 unit kendaraan dinas (sepeda motor) sudah dilaporkan rusak berat tetapi masih dibayarkan pajak kendaraan, tetapi biaya service dan penggantian suku cadangnya sudah tidak direalisasikan.

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

➤ **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah pelatihan, bimtek dan diklat yang diikuti aparatur sebanyak 4 orang dan terealisasi 4 orang. Anggaran Sebesar Rp. 14.503.000,- terealisasi Sebesar Rp. 10.550.000,-. Anggaran pada kegiatan ini sifatnya disediakan dan penggunaannya disesuaikan dengan undangan/pemanggilan peserta.

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

➤ **Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah sebanyak 1 dokumen dengan realisasi 100%. Anggaran Sebesar Rp. 10.000.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 9.927.000,- atau 99,27%.

9. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

➤ **Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD**

Target *output* kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 100%. Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan Realisasi Sebesar Rp. 9.927.000 atau sebesar 99,27%,-.

Analisis Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	Indikator Kinerja	IKK	Satuan	KONDISI AWAL 2021	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		TARGET AKHIR 2026
					2022	2023	2024	2025	2020	2021	2021	2022	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)		Juta Rupiah	3.000.000	3.300.000	3.500.000	3.800.000	3.900.000	3.822.080	3.992.717	3.000.000	3.000.000	4.000.000
2.	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha		Nilai	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00	70.00	-	71.00	72.00	82.00
3.	Nilai SAKIP		Nilai	B(62.00)	B(63.00)	64.00	65.00	66.00	63.00	-	63.01	63.00	67.00

Rata-rata Lama Penyelesaian Perizinan Usaha :

- 25,00 – 43,75 : Tidak Baik
- 43,76 – 62,50 : Kurang Baik
- * 62,51 – 81,25 : Baik
- * 81,26 – 100,00 : Sangat Baik

Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Target dari kinerja sasaran pendukung belum dapat digambarkan dengan jelas dalam tabel, hal ini karena penilaian SAKIP untuk tahun 2020 masih dalam proses evaluasi. Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, terdapat beberapa komponen dalam evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang masih perlu penyempurnaan. Komponen tersebut adalah :

- a. Target kinerja yang diperjanjikan belum dipergunakan untuk mengukur keberhasilan
- b. IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja
- c. Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya
- d. Hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- e. Belum ada mekanisme pengumpulan data kinerja
- f. Tidak ada pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan
- g. Belum dilakukan evaluasi program secara berkala
- h. Evaluasi program tidak memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/Teknis perkantoran
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Kunjungan Kerja dalam daerah
- b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional
 - Pembangunan taman, lapangan/Fasilitas parkir
- c. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- d. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- e. Program perencanaan dan penganggaran SKPD

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Berdasarkan tabel.2 tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai Investasi PMA

Penjelasan :

Realisasi nilai investasi PMA setiap tahunnya menjadi peningkatan positif, hal ini berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja.

2. Nilai Investasi PMDN

Penjelasan :

Peningkatan nilai PMDN di akibatkan oleh karena adanya kebijakan penyederhanaan perizinan dan perizinan sehingga kedepannya dalam rangka mendorong peningkatan PMDN harus diberikan kebijakan insentif investasi.

3. Jumlah Investasi PMA

Penjelasan :

Pada dasarnya pencapaian nilai realisasi PMA tidak terlepas dari kebijakan kemudahan berinvestasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini.

4. Jumlah Investasi PMDN

Penjelasan :

Realisasi jumlah investasi PMDN setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini di dorong oleh salah satu kebijakan penerapan perizinan secara online.

5. Presentase Jumlah Izin yang di terbitkan

Penjelasan :

Terjadi peningkatan persentase jumlah izin yang diterbitkan dari tahun 2017, 2018 ke tahun 2019 khususnya untuk izin tenaga kesehatan dan pengurusan Perjanjian Waktu Kerja Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) sudah tidak menerbitkan izin gangguan dan memberhentikan Retribusi Izin gangguan setelah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri No.500/3231/SJ Tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017.

6. Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti

Penjelasan :

- a. Berdasarkan hasil evaluasi layanan pengaduan dari masyarakat tentang tanggapan atau tindak lanjut keluhan pengguna pelayanan dapat di jelaskan bahwa dari tahun 2018 ke 2019 terdapat 7 (tujuh) pengaduan permasalahan yang bermasalah baik dari sektor bisnis maupun swasta, dari ke 7 permasalahan tersebut yang dapat kami selesaikan sebanyak 6 kasus sedang yang 1 (satu) kasus lainnya
-

diteruskan dan difasilitasi ke provinsi karena menjadi kebijakan provinsi.

- b. Sedikitnya pengelolaan pengaduan masyarakat yang masuk pada loket layanan DPMPTSP Kab. Luwu Timur, mencerminkan adanya peningkatan yang cukup baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat atau pengusaha dan ini sesuai dengan visi dan misi DPMPTSP Luwu Timur
- c. Dalam mendukung kegiatan pengelola pengaduan DPM PTSP Luwu Timur menyiapkan sarana dan prasarana layanan untuk menyampaikan pengaduan saran dari petugas pelayanan mendorong dan membantu bagi pengusaha untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia
- d. Pengaduan atau penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dapat disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistim pelayanan informasi secara elektronik (internet, e-mail maupun telpon) dan melalui kotak saran layanan pengaduan yang sedia di DPM dan PTSP serta menyiapkan lembaran kuesioner indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai bentuk evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur.

7. Jumlah PMA dan PMDN yang dibina

Penjelasan :

Berdasarkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan pada tahun 2020 ada 5 PMA yang selama ini di bina yang diselenggarakan tiap triwulan, sedangkan PMDN ada sekitar 16 PMDN yang selama ini diberikan Pembinaan.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat

Penjelasan :

Berdasarkan hasil kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama T.A 2020 dilaksanakan/dilakukan pengambilan sampel atau responden sebanyak 200 dengan hasil kegiatan tersebut dilaksanakan pada perusahaan yang tersebar di Kabupaten Luwu Timur 85,51 dimana metode dilakukan ada 2 yaitu secara langsung dilakukan di tempat perusahaan dan dilaksanakan pada saat melakukan pengurusan yang dilaksanakan di tempat.

9. Nilai Evaluasi AKIP

Penjelasan :

Berdasarkan penilaian dari Inspektorat, Hasil evaluasi AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Tahun 2017 diperoleh nilai skor 50 dengan peringkat C. Sedangkan hasil penilaian Tahun 2020 diperoleh nilai 63,00 dengan peringkat B, hasil ini mengalami penurunan bila dibandingkan Tahun 2019.

10. Persentase Pegawai yang mendapat Diklat Per Tahun

Penjelasan :

Persentase pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan mulai dari tahun 2016 sampai ke tahun 2020 mengalami persentase rata-rata nilai 95 % setiap tahunnya, hal ini dikarenakan jumlah aparatur yang mengikuti Diklat tiap tahunnya sesuai dengan undangan Bimtek yang masuk dan jumlah anggaran yang tersedia.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Tingkat kinerja pelayanan perangkat Daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang penanaman modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan Bidang Penanaman Modal
- 2) Pengkoordinasian Kebijakan Bidang Penanaman Modal
- 3) Penyusunan Peta Potensi Penanaman Modal
- 4) Penyusunan Dokumen Penanaman Modal

Sesui dengan Tugas Pokok dan Fungsi di atas maka kinerja bidang penanaman modal difokuskan pada penyusunan kajian potensi penanaman modal, Peningkatan penyediaan data informasi PM dan promosi yang dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan citra Kabupaten Luwu Timur dimata investor baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu kinerja Bidang Penanaman Modal diukur dari peningkatan investasi setiap Tahunnya, baik dari segi presentase pertumbuhan jumlah proyek PMA dan PMDN dari tahu ke tahun, jumlah nilai investasi , maupun penyerapan tenaga kerja.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

- 1) Belum adanya regulasi untuk mempermudah investor untuk melakukan investasi sehingga mengurangi minat untuk melakukan investasi di Kabupaten Luwu Timur;
 - 2) Belum adanya dokumen/kajian potensi sector investasi yang dapat memudahkan bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya;
 - 3) Belum tersedianya peta potensi investasi sebagai gambaran bagi investor;
 - 4) Belum tersedianya sarana prasana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Luwu Timur;
 - 5) Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur yang komprehensif dan aman. Dalam mengatasi masalah ini maka perlu peningkatakan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perizinan dan non perizinan. Dalam
-

skala lebih besar dimungkinkan perlunya 1 bank arsip perizinan dan non perizinan yang representative;

- 6) Belum tersedianya sumberdaya manusia yang memadai, sehingga perlu dilakukan Diklat pelayanan public; belum tersedianya anggaran yang memadai dalam proses pelayanan jemput bola kepada masyarakat.
- 7) Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan penyediaan tenaga OPD teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur sehingga waktu penyelesaian suatu perizinan dapat selesai dengan lebih cepat.

c. Dampak Terhadap pencapaian visi dan misi

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Luwu Timur terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan berpedoman kepada Peraturan perundangan dan SOP yang telah di tetapkan, di samping itu juga melakukan upaya - upaya sabagai berikut :

- Melakukan Pelayanan Sistem Jemput Bola/door to door untuk pengurusan IMB (Izin mendirikan bangunan) dan pengantaran izin usaha bagi perusahaan/kontraktor di kecamatan.
- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat melalui Media Massa, Baliho, Brosur dan media online.
- Melakukan sosialisasi kepada Aparat Desa dan Kecamatan

d. Tantangan dan peluang

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan Bidang Penanaman Modal Mempunyai tantangan sebagai berikut :

1. Semakin meningkatnya peran nilai investasi dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur
 2. Semakin tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan berkualitas
-

3. Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi
4. Belum adanya Perda Penanaman Modal dan Kemudahan Peluang Berusaha
5. Belum adanya Dokumen peluang investasi
6. Belum adanya Peta potensi investasi

Sedangkan Peluang yang ada antara lain :

1. Tingginya Dukungan Pemerintah memberikan peluang terhadap penanaman modal;
 2. Iklim usaha yang kondusif;
 3. Posisi geografis yang strategis
 4. Potensi yang berlimpah
- e. Formulasi isu-isu penting yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur guna mengatasi isu-isu penting tersebut adalah :

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal terdapat isi-isu penting guna meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Luwu Timur adalah peningkatan realisasi PMA dan PMDN dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Langkah Strategis yang dilaksanakan Bidang Penanaman Modal guna mengatasi isu penting tersebut di atas adalah:

- a. Penyusunan regulasi untuk mempermudah investor melakukan investasi;
 - b. Penyederhanaan prosedur pelayanan;
 - c. Peningkatan kualitas kajian potensi Penanaman Modal;
 - d. Pemangkasan alur birokrasi pelayanan;
 - e. Peningkatan peran satuan Tugas Percepatan Berusaha;
 - f. Meningkatkan fasilitas pengembangan Penanaman Modal.
 - g. Peningkatan penyediaan data dan informasi penanaman modal.
-

Faktor-faktor penyebab tercapainya/terpenuhinya kinerja program/kegiatan, dalam pencapaian target SKPD, antara lain karena :

1. Mengutamakan Pelayanan Perizinan yang Prima kepada Masyarakat dengan melakukan kegiatan pelayanan langsung jemput bola ke desa dan kecamatan seluruh wilayah kabupaten luwu timur.
2. Sebagai isu sentral " Pelayanan Langsung yang merupakan Grend Program Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disambut baik oleh masyarakat.
3. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp. 1.700.000.000,-

Peningkatan Kompetensi SDM dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terutama dalam sistem program SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan).

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan kegiatan. Review dilakukan dalam rangka menyesuaikan usulan renja dengan kebutuhan tahun 2022. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD dan Renja Bapelitbangda Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

LAMPIRAN 3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022 KABUPATEN LUWU TIMUR

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA TERPADU SATU PINTU

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (%)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capain Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capain Kinerja	Kebutuhan Dana	
1	3	4	5	9		3	4	5	9		22
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)		100	3.781.251.048	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)		100	4.221.719.478	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100%	84.425.340	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu		100%	84.425.340	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu		2 Dokumen	6.373.484	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu		2 Dokumen	6.373.484	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu		2 Dokumen	10.773.641	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu		2 Dokumen	10.773.641
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu		3 dokumen	30.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu		3 dokumen	30.600.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun		10 Dokumen	36.678.215	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun		10 Dokumen	36.678.215
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100%	2.365.097.839	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik		100%	2.714.967.839
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu		18 dokumen	103.207.536	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu		18 dokumen	103.207.536
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		26 Orang	2.261.890.303	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		26 Orang	2.611.760.303

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar		100%	15.614.327	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar		100%	16.082.757
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun		4 Dokumen	15.614.327	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun		4 Dokumen	16.082.757
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD		90%	11.645.560	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD		90%	11.645.560
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun		4 Dokumen	11.645.560	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun		4 Dokumen	11.645.560
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95%	113.189.552	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95%	113.189.552
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan		43 Stel	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan		43 Stel	30.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		14 Orang	74.360.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		14 Orang	74.360.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)		0	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)		0	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian		100%	8.829.552	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian		100%	8.829.552
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		95%	362.786.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD		95%	452.916.600
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi		150 Orang	5.400.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi		150 Orang	5.400.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan		12 jenis	5.857.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan		12 jenis	5.857.300

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		2 Jenis	14.398.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		2 Jenis	14.398.300	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		3 Unit	7.336.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan		3 Unit	10.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		60 Examp lar	6.120.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		60 Examp lar	6.120.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti		300 Kali	300.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti		300 Kali	387.466.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		3 unit	10.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		3 unit	10.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan		3 jenis	13.675.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan		3 jenis	13.675.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100%	577.511.150	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi		100%	577.511.150	

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		4 Unit	29.117.350	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		4 Unit	29.117.350	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan		1 Unit	500.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		2 Unit	48.393.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		2 Unit	48.393.800	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		0	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)		0	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100%	149.234.880	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)		100%	149.234.880	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan		60 Rekening	58.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan		60 Rekening	58.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan		1200 Surat	19.234.880	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan		1200 Surat	19.234.880
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan		4 orang	72.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan		4 orang	72.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		95%	101.745.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)		95%	101.745.800
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		40 Unit	30.900.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		40 Unit	30.900.000

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara		10 Unit	45.250.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara		10 Unit	45.250.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	25.595.800	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 unit	25.595.800	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)		35	331.417.531	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)		35	511.417.531	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi		100%	181.417.531	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi		100%	211.417.531	

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda Penanaman Modal yang terbit		1 Dokumen	120.000.000	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda Penanaman Modal yang terbit		1 Dokumen	150.000.000	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan		2 laporan	61.417.531	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan		2 laporan	61.417.531	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Peta Potensi Investasi		100%	150.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Peta Potensi Investasi		100%	300.000.000	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha di kabupaten/kota		1 Dokumen	150.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha di kabupaten/kota		1 Dokumen	300.000.000	
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal (%)		15	290.000.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal (%)		15	390.000.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan		90%	290.000.000	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang		90%	390.000.000	

Daerah Kabupaten/Kota						diikuti/dilaksanakan				
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Promosi Penanaman modal		3 Media	40.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Promosi Penanaman modal		3 Media	40.000.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan		4 Event	250.000.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan		4 Event	350.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)		75	328.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)		75	360.000.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan PMA / PMDN		90%	328.000.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan PMA / PMDN		90%	360.000.000	

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang diawasi (PMDN/PMA)		13	88.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang diawasi (PMDN/PMA)		13	98.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang dibina (PMDN/PMA)		8	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang dibina (PMDN/PMA)		8	210.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang di pantau (PMDN/PMA)		7	40.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang di pantau (PMDN/PMA)		7	52.000.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal (%)		100	325.000.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal (%)		100	355.000.000
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu		100%	325.000.000	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu		100%	355.000.000

Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti		5 Pengaduan	25.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti		5 Pengaduan	25.000.000	
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan		2500 Izin	300.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan		2500 Izin	330.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)		1	35.644.627	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)		1	35.644.627	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola		100%	35.644.627	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola		100%	35.644.627	

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data yang disediakan		2 Dokumen	35.644.627	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data yang disediakan		2 Dokumen	35.644.627
				5,091,313,206					5,873,781,636

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sinkronisasi program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang telah ditetapkan melalui **RPJMD** dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui tahapan berikut :

- Kebijakan umum setiap agenda pokok pembangunan dijabarkan oleh tim perancangan daerah (BAPPELITBANGDA) yang di kemudian hari oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) di perjelas dalam bentuk Program Prioritas dengan indikator keluaran / sasaran dan pagu indikatif yang jelas.
- Program prioritas dan pagu indikatif dari masing-masing bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) akan menjadi bahan diskusi dalam Musrembang Kecamatan Untuk menyusun rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan di bahas dalam Musrembang Kabupaten.
- Hasil Musrembang Kabupaten akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun tersebut.

Secara Spesifik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) pada Rencana Kerja tahun 2021 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk Program dan Kegiatan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, namunpun demikian kalau ada usulan dari masyarakat yang terkait permasalahan Perizinan dan Non Perizinan yang terjadi di masyarakat, maka kami dari Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu siap menerima dan akan menindaklanjuti dari usulan tersebut demi kepentingan masyarakat khususnya para pelaku usaha.

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan Pembangunan Nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua Sasaran dan Prioritas serta Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua Pemangku Kepentingan.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah). Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.

Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat “payung” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha
2. izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
3. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
4. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
5. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SiCantik. SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyerdehanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri adalah aplikasi berbasis web yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan 2026. Penetapan tujuan ini harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat melahirkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai.

Penjabaran dari tujuan secara spesiifik dan terukur dirumuskan kedalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur.

Tujuan dan indikator tujuan DPMPTSP tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :



LAMPIRAN. 4
TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	Meningkatkan jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	Rasio Daya Serap Tenaga kerja(PMDN dan PMA)	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3.300.000.000.000
2	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Pelayanan perizinan usaha	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	80.20
3	Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP	Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Capaian Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	92.01

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2022 terdiri dari 5 program yang meliputi 15 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan kinerja penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar yang terdiri dari kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Program tersebut diarahkan untuk peningkatan jumlah Investor PMA dan PMDN terdiri dari kegiatan :

- a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/KotaPengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota
-

3. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program tersebut diarahkan untuk Meningkatkan Rencana Investasi Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program tersebut diarahkan untuk menghitung Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terdiri dari kegiatan :

- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program tersebut diarahkan untuk menghitung Cakupan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari kegiatan :

- a. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program tersebut diarahkan untuk menghasilkan 1 dokumen database Penanaman Modal yang valid, terdiri dari kegiatan :

- a. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
-

LAMPIRAN 5

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023 (Rancangan Awal) KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (N)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 (N+1)		
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
0	Non Urusan									
0	0			-						
0	0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai Standar	100 persen (%)	3.711.251.048		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai Standar	100 persen (%)	3.711.251.048
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	84.425.340	PAD	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %	84.800.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dsusun tepat waktu	3 dokumen	30.600.000	PAD		3 dokumen	30.600.000

			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	10.773.641	PAD		2 dokumen	11.000.000
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2 dokumen	6.373.484	PAD		2 dokumen	6.500.000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10 dokumen	36.678.215	PAD		10 dokumen	36.700.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2.714.967.839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %	2.800.000.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya yang terbayarkan	24 Orang	2.611.760.303	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Orang	2.700.000.000

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	18 dokumen	103.207.536	PAD		18 dokumen	100.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai Standar	100%	15.614.327	PAD	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai Standar	100%	15.000.000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	15.614.327	PAD		4 dokumen	15.000.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	90 %	11.645.560		Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	90 %	12.000.000
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 dokumen	11.645.560			4 dokumen	12.000.000

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	95 %	113.189.552	PAD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	95 %	100.500.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	43 stel	30.000.000	PAD		43 stel	30.000.000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	4 dokumen	8.829.552	PAD		4 dokumen	9.000.000
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan teknis	10 Orang	74.360.000	PAD		10 Orang	61.500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	95 %	442.916.600	PAD	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Administrasi Umum PD	95 %	460.200.000

			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	5.857.300	Pendapatan Daerah		12 jenis	6,000,000
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan	3 Unit	10.000.000	Pendapatan Daerah		3 Unit	10.000.000
			Penyediaan bahan logistik kantor	Kabupaten, SKPD, MALILI	Jumlah Bahan Bakar Minyak/gas/Pelumas yang disediakan	2 Jenis	14.398.300	Pendapatan Daerah		2 Jenis	15,000,000
			penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kabupaten, SKPD, MALILI	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	13.675.000	Pendapatan Daerah		3 Jenis	14.000.000
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 eksamplar	6.120.000	Pendapatan Daerah		60 eksamplar	6,200,000

				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi kunjungannya	150 orang	8.400.000			150 orang	9.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	300 Kali	387.466.000			300 Kali	400.000.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	577.511.150	PAD	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	90.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan/mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	29.117.350			4 Unit	30.000.000
				Pengadaan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	1 Unit	500.000.000			-	0
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Sarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	2 Jenis	48.393.800			2 Jenis	60.000.000

			Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase rata-rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	100 persen (%)	149.234.880		Persentase rata-rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	100 persen (%)	160,000,000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten, SKPD, MALILI	Jumlah Pelayanan Surat Menyurat yang disediakan	1.200 Surat	19.234.880	Pendapatan Daerah		1.200 Surat	25.000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten, SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	Jumlah rekening bulanan jasa komunikasi sda, listrik dan TV kabel yang terbayarkan	60 rekening	58.000.000	Pendapatan Daerah		60 rekening	60.000.000
			Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	jumlah Tenaga jasa Pelayanan yang terbayarkan	4 orang	72.000.000	Pendapatan Daerah		4 orang	75.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Bemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah yang terselenggara dengan baik	95 %	101.745.800		Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah yang terselenggara dengan baik	95 %	110.000.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	45.250.000	Pendapatan Daerah		10 Unit	45.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SKPD, MALILI	Jumlah Peralatan dan Masin lainnya yang dipelihara	47 unit	30.900.000	Pendapatan Daerah		47 unit	35,000,000

				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 unit	25.595.800	Pendapatan Daerah		1 unit	30.000.000
2												
2	18			Penanaman Modal								
02	18	03		Program Promosi Penanaman Modal		Persentase Rencana Investasi penanaman Modal	10 %	290,000,000		Persentase Rencana Investasi penanaman Modal	20 %	450,000,000
02	18	03	201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	90 %	290.000.000		Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	90 %	450.000.000
02.18.03.201.01				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kabupaten, MALILI, PUNCAK INDAH	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	3 Media	40.000.000	Pendapatan Daerah	Jumlah Media Promosi Penanaman Modal	3 Media	50,000,000
02.18.03.201.02				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	SKPD, MALILI	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	3 Event	250.000.000	Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	3 Event	400,000,000
02	18	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	35 Investor	361.417.531		Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional	40 Investor	950.000.000

02.18.02.201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten, MALILI, PUNCAK INDAH	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	100 %	211.417.531	Pendapatan Daerah	Persentase PMA dan PMDN yang terfasilitasi	100 %	600.000.000	
02.18.02.201.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten, SKPD, PUNCAK INDAH	Jumlah PERDA Penanaman Modal yang dibuat	1 PERDA	150.000.000	Pendapatan Daerah	Jumlah PERDA Penanaman Modal yang dibuat	1 PERDA	500.000.000	
02.18.02.201.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kabupaten, MALILI, PUNCAK INDAH	Jumlah Kegiatan Evaluasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	61.417.531	Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi yang dilaksanakan	2 Kegiatan	100.000.000	
02.18.02.202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	PUNCAK INDAH	Persentase ketersediaan dokumen peta potensi investasi	4 Dokumen	150,000,000	Pendapatan Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penanaman modal yang dimanfaatkan	4 Dokumen	350,000,000	
02.18.02.202.01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Peluang Investasi kabupaten Luwu Timur	1 Dokumen	150.000.000		Jumlah Peta Potensi Peluang Investasi kabupaten Luwu Timur	1 Dokumen	350.000.000	
02	18	04	Program Pelayanan Penanaman Modal		Persentase Capaian kinerja program pelayanan penanaman modal	100 persentase (%)	355,000,000	Persentase Capaian kinerja program pelayanan penanaman modal	100 persentase (%)	400,000,000
02.18.04.201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten, SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan nonperizinan secara Terpadu	100 %	355.000.000	Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan nonperizinan secara Terpadu	100 %	400,000,000	

02.18.04.201.01				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	Jumlah Izin yang dilayani secara elektronik	2250 Izin	330,000,000	Pendapatan Daerah	Jumlah Izin yang dilayani secara elektronik	2250 Izin	370,000,000
02.18.04.201.02				Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 pengaduan	25,000,000	Pendapatan Daerah	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	5 pengaduan	30,000,000
02	18	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	75 Persen	338,000,000		Persentase Realisasi Investasi	80 Persen	370,000,000
02	18	05	201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan PMA/PMDN	90 %	338.000.000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan PMA/PMDN	90 %	370.000.000
02.18.05.201.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	Kegiatan Pemantauan kepada Pelaku Usaha PMDN dan UKM	7 Kegiatan	40,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	jumlah laporan Pengawasan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	4 Dokumen	50,000,000
02.18.05.201.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	Jumlah Bimtek/Sosialisasi Kemudahan Berusaha kepada PMA/PMDn dan UKM	8 Kegiatan	200,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	jumlah PMA dan PMDN yang dipantau dan melaporkan LKPM yang disampaikan tepat waktu	17 Laporan Kegiatan Penanaman Modal	200,000,000

02.18.05.201.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	SKPD, MALILI, PUNCAK INDAH	Kegiatan Pengawasan kepada Pelaku Usaha PMDN dan UKM	13 Kegiatan	98,000,000	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	90 persen (%)	120,000,000
02.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	1 Dok	35.644.627	PAD	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid	1 Dok	50.000.000
02.18.06.201.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%	35.644.627	PAD	Persentase data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%	50.000.000
02.18.06.201.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen	35.644.627	PAD	Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen	50.000.000
			TOTAL		5.091.313.206				6,052,500,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur telah merumuskan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sebagai pemimpin Dinas dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya untuk tetap bersinergis dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi-instansi terkait dalam peningkatan pembangunan sesuai dengan **visi misi “Kabupaten Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Untuk itu kelompok sasaran yang diprioritaskan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah. Selain itu, aparatur pemerintah atau SDM yang ada di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur merupakan kelompok sasaran yang diharapkan dapat bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Pendanaan indikatif merupakan estimasi pagu anggaran yang disiapkan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan. Estimasi tersebut berdasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 dan memperhatikan perkembangan kegiatan yang mengharuskan ketersediaan dana yang cukup untuk menunjang suatu kegiatan agar tujuan menjadi berhasil guna dan memiliki azas manfaat lebih.

Pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD dan diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat lihat pada Tabel 7:

LAMPIRAN 6.
Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Organisasi
1	2	3	4	6	7	8
BIDANG PENANAMAN MODAL						
	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)	35	305.000.000	DPMPTSP
	002. 01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMDN/PMA yang terfasilitasi	100%	155.000.000	DPMPTSP
	002. 01. 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Perda Penanaman Modal yang terbit	1 Dokumen	100.000.000	DPMPTSP

	002. 01. 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif PM yang dihasilkan	2 laporan	55.000.000	DPMPTSP
	002. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Dokumen Peta Potensi Investasi	100%	150.000.000	DPMPTSP
	002. 02. 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha di kabupaten/kota	1 Dokumen	150.000.000	DPMPTSP
	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal (%)	15	225.105.588	DPMPTSP
	003. 01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	90%	225.105.588	DPMPTSP
	003. 01. 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Promosi Penanaman modal	3 Media	25.105.588	DPMPTSP
	003. 01. 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan	3 Event	200.000.000	DPMPTSP
BIDANG DALAG						
	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	75	367.368.711	DPMPTSP

	005.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan PMA / PMDN	90%	367.368.711	DPMPTSP
	005.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang diawasi (PMDN/PMA)	13	98.788.825	DPMPTSP
	005.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang dibina (PMDN/PMA)	8	215.381.723	DPMPTSP
	005.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah PMDN/PMA yang di pantau (PMDN/PMA)	7	53.198.163	DPMPTSP
BIDANG PTSP						
	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal (%)	100	355.000.000	DPMPTSP
	004.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	100%	320.323.933	DPMPTSP
	004.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	5 Pengaduan	20.323.923	DPMPTSP

	004. 01. 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin yang diterbitkan	2500 Izin	300.000.000	DPMPTSP
	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)	1	30.000.000	DPMPTSP
	006. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola	100%	30.000.000	DPMPTSP
	006. 01. 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data yang disediakan	2 Dokumen	30.000.000	DPMPTSP
SEKRETARIAT						
	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	3.059.512.899	DPMPTSP
	001. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	67.147.125	DPMPTSP

	001. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	6.373.484	DPMPTSP
	001. 01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu	2 Dokumen	10.773.641	DPMPTSP
	001. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu	3 dokumen	25.000.000	DPMPTSP
	001. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	10 Dokumen	25.000.000	DPMPTSP
	001. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100%	2.321.643.922	DPMPTSP
	001. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu	18 dokumen	100.000.000	DPMPTSP
	001. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	26 Orang	2.221.643.922	DPMPTSP
	001. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100%	10.000.000	DPMPTSP

	001. 03. 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun	4 Dokumen	10.000.000	DPMPTSP
	001. 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	90%	9.000.000	DPMPTSP
	001. 04. 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	4 Dokumen	9.000.000	DPMPTSP
	001. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	98.789.552	DPMPTSP
	001. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan	43 Stel	20.600.000	DPMPTSP
	001. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan	14 Orang	39.3600.000	DPMPTSP
	001. 05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	4 orang	10.000.000	DPMPTSP

	001. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi (orang)	2 Orang	20.000.000	DPMPTSP
	001. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian	100%	8.829.552	DPMPTSP
	001. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD	95%	329.932.300	DPMPTSP
	001. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	150 Orang	5.400.000	DPMPTSP
	001. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan	12 jenis	5.857.300	DPMPTSP
	001. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	2 Jenis	8.000.000	DPMPTSP
	001. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	3 Unit	3.000.000	DPMPTSP
	001. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60 Exemplar	5.000.000	DPMPTSP
	001. 06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	300 Kali	286.000.000	DPMPTSP
	001. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	3 unit	3.000.000	DPMPTSP

	001. 06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan	3 jenis	13.675.000	DPMPTSP
	001. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100%	14.000.000	DPMPTSP
	001. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Unit	10.000.000	DPMPTSP
	001. 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	-	DPMPTSP
	001. 07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	4.000.000	DPMPTSP
	001. 07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	-	-	DPMPTSP
	001. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100%	144.000.000	DPMPTSP
	001. 08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	60 Rekening	58.000.000	DPMPTSP
	001. 08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	1200 Surat	14.000.000	DPMPTSP

	001. 08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	4 orang	72.000.000	DPMPTSP
	001. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik (%)	95%	101.745.800	DPMPTSP
	001. 09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40 Unit	15.000.000	DPMPTSP
	001. 09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara	10 Unit	35.000.000	DPMPTSP
	001. 09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	15.000.000	DPMPTSP
Jumlah Pagu Indikatif					4.307.311.131	
Jumlah Program					6	
Jumlah Kegiatan					15	
jumlah Sub Kegiatan					39	

BAB V. PENUTUP

Dokumen rencana kerja (Renja) ini disusun dengan tetap memperhatikan arahan dan substansi materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026.

Renja ini memiliki fungsi sebagai instrument pengarah dan pengendali pelaksanaan fungsi dan pelayanan yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini diharapkan dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi secara keseluruhan. Diseminasi Renja ini akan memungkinkan seluruh anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana organisasi akan dibawa, bagaimana setiap anggota organisasi harus bekerja dan bagaimana tingkat keberhasilan diukur.

Dengan dirumuskannya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 ini, semua kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2022 diharapkan akan mengacu pada Renja yang telah disepakati bersama.

Akhirnya, bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini sangat tergantung pada kinerja seluruh aparat lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Amin

Malili, Juni 2021
Kepala Dinas


Andi Habil Unru,SE
Nip : 19641231 198703 1 208